

**SEJARAH DAN PERAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA CABANG SURABAYA DALAM POLITIK
NASIONAL PADA TAHUN 1990-1998**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Pengajuan Proposal Skripsi
Gelar Sarjana Dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Fahmy Arya Saifuddin
A.322.13.099**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahmy Arya Saifuddin

NIM : A32213099

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Sejarah Perkembangan Majalah Aula Tahun 1978-2019" ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau buah karya tangan saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari penelitian ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar ke sarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 10 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



FAHMY ARYA SAIFUDDIN

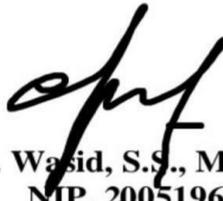
NIM. A32213099

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING**

Skripsi yang disusun oleh Fahmy Arya Saifuddin (A32213099) dengan judul “Sejarah dan Peran Organisasi Pergerakab Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya dalam Politik Nasional Pada tahun 1990-1990” ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 10 Juni 2020 di Surabaya.

Oleh

Dosen Pembimbing



**Dr. Wasid, S.S., M.Fil.I
NIP. 2005196**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n. Fahmy Arya Saifuddin (A32213099) telah diuji dan dinyatakan

lulus Pada tanggal 7 Juli 2020

Ketua/Penguji I

Dr. Wasid, S.S., M.Fil.I
NIP. 2005196

Penguji II

Dr. H. Achmad Zuhdi DH, M.Fil.I
NIP. 196110111991031001

Penguji III

Dr. H. M. Khodafi, M.Si.
NIP. 197211292000031001

Sekretaris/Penguji IV

Moh. Atikurrahman, M.A.
NIP. 198510072019031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya




M. Agus Aditoni, M. Ag
NIP. 210021992031001

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahmy Arya Saifuddin
NIM : A32213089
Fakultas/Jurusan : Adab & Humaniora / Sejarah peradaban Islam
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sejarah dan peran Organisasi pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Surabaya dalam politik Nasional pada tahun 1990 - 1998

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11-September-2020
Penulis

(Fahmy Arya Saifuddin)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sejarah dan Peran Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Indonesia Dalam Politik Nasional Pada Tahun 1990-1998”. Peneliti memberikan batasan permasalahan pada tiga hal, yaitu: (1) Bagaimana sejarah berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Surabaya ? (2) bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru ? (3) bagaimana peran PMII Surabaya dalam menghadapi dinamika politik nasional pada tahun 1990-1998 ?.

Penulisan skripsi ini disusun dengan metode penelitian sejarah, yaitu : *Heuristik* (pengumpulan sumber), *Verifikasi* (kritik sumber), *Interpretasi* (penafsiran sumber), dan *Historiografi* (penulisan sejarah). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di masa lampau). Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori kepemimpinan visioner (kepemimpinan seseorang melalui penciptaan visi, perumusan visi, transformasi visi, dan implementasi visi).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1). PMII Cabang Surabaya dipromotori oleh beberapa orang dari kampus di Surabaya yaitu UNAIR, ITS, IAIN Sunan Ampel Surabaya yang mana organisasi ini bertujuan membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. (2). Banyak peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan saat itu dari kondisi politik antara lain adanya pelengseran Soekarno dengan Super Semarnya, fusi partai dan diterapkannya pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi, dalam sektor ekonomi pemerintahan ini berjalan program Repelita yang berjalan sampai lima kali, sedangkan untuk bidang sosial adanya kerusuhan antara etnis keturunan Cina dan orang Indonesia, pelaksanaannya P4, sampai terbentuknya ICMI. (3). Dengan banyaknya kecauan dan isu-isu nasional yang sudah banyak tersebar, PMII cabang Surabaya di kota dan kepusat ibu kota negara. Di kota sendiri PMII Cabang Surabaya membuat organisasi masa seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS), Arek-arek Pro Reformasi (APR), Arek Suroboyo Pro Reformasi (ASPR). Sedangkan dalam pergerakan Nasional PMII Cabang Surabaya beraliansi dengan Kelompok Cipayang dan Forum Kota (FORKOT).

Latar belakang warga PMII secara antropologis dibesarkan pada budaya agraris, secara teologis sebagaimana bangsa Indonesia pada umumnya warga PMII berlatar belakang Ahlus-Sunnah wal Jama'ah sebagai idiologi dogmatis, dalam konteks disiplin keilmuan yang berbasis keagamaan dan humaniora. Dan dalam politik, ekonomi PMII menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang berada dalam marjinalisasi tertentu. Secara umum ruang gerak identitas PMII terletak pada; intelektualitas, releguitas dan kebangsaan, dengan identitas ini mereka diharuskan untuk lebih cerdas dalam menggeliat dari arus penyeragaman.

Dari tiga identitas ini, PMII memiliki potensi strategis sebagai kekuatan intelektual sekaligus moral untuk memeberikan makna kehidupan berbangsa. Aktualisasi PMII sebagai *Student Movement* sekaligus *Islamic Movement* di Indonesia berwujud dalam karya pencerahan melalui berbagai pelatihan dan sistem pendidikan maupun belajar, membangun kehidupan bersama dengan segment masyarakat yang menjadi basis kultur yang dimilikinya. Keperpihaknya yang tulus dan jujur merupakan bagian integral dai semangat PMII; yakni kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sebagai organisasi yang memiliki potensi kreatif dan berfikir mandiri, brsikap kreatif dalam berkarya, melalui semangat kebangsaan yang dijiwai oleh spiritualitas keIslaman dan ke-indonesian, PMII telah meemberikan jaminankeberpihakan kepada kebhinekaan bangsa, menuju Indonesia yang dicita-citakan. Dan

didalamnya adalah PMII. Gejala seperti itu juga bisa dilihat ke semua organisasi mahasiswa yang lainnya, termasuk didalamnya PMII yang baru saja lahir diwaktu itu juga.

PMII juga ikut berpartisipasi dalam bidang politik, pada Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke IV tahun 1970 di kota Makasar Sahabat Rohim Hasan mengatakan “mengapa PMII mesti berpolitik ? bukankah itu akan mengganggu tugas utamanya, belajar dan belajar ?, bukankah persoalan politik itu nanti setelah lulus dan terjun ditengah masyarakat ?, ruang kuliah adalah preparasi untuk perkerjaan politik”.

Aksi-aksi kita adalah sekaligus aksi belajar dan aksi politik. Lebih lengkapnya dia mengatakan “Mengapa PMII mesti berpolitik baik secara praktis maupun konsepsional, belajar dan berpolitik bukanlah suatu hal yang tabu, tetapi justru prinsip berpolitik itu adalah bersamaan dengan keberadaan PMII itu sendiri”.

Hal ini juga telah dimuat dalam dokumen historis PMII (Gelora Megamendung) Pokok-pokok pikiran training course II PMII pada tanggal 17-27 april 1965 di Gelora Megamendung kota Bogor Jawa Barat yang juga menolak dengan tegas prinsip ilmu untuk ilmu. PMII dengan tegas menerapkan bahwa ilmu harus juga diamalkan, dalam artian untuk kepentingan masyarakat dalam bidang agama, bangsa dan negara. Tugas setiap warga PMII pada waktu itu adalah terjun dalam kegiatan politik yang bisa diartikan mengikuti kegiatan partai dalam bentuk apapun.

Kampus promotor adanya PMII di Surabaya adalah dari 3 kampus. Yaitu Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada masa-masa awal terbentuknya PMII mereka secara isentif masih melakukan konsolidasi-konsolidasi ke dalam untuk pembenahan dan pengembangan organisasi.

Pada tahun 1960, pasang surut perkembangan PMII cabang Surabaya sangat nampak terjadi rivalitas organisasi ekstra mahasiswa masih sangat terjadi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Banyak mahasiswa yang beragama Islam bergabung sebagai kader HMI dikarenakan berafiliasi dengan Partai Politik Islam Masyumi dan sebagai simbolisasi kelompok Islam yang modernis. Mereka menduduki sektor-sektor penting di dalam kampus di Surabaya seperti menjabat di BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan menyebabkan perebutan calon anggota atau kader dari setiap organisasi ekstra tersebut agar bisa melanjutkan organisasi dari masa ke masa dan ketua pertama PMII cabang Surabaya adalah Akhyat Sutejo.

Pada bulan Oktober 1965 sampai Maret 1966. Salah satu organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang dapat dukungan oleh tentara menggelar demonstrasi di Jakarta yang diikuti cabang-cabang di berbagai wilayah Indonesia termasuk Surabaya, dengan membawa tuntutan pembubaran PKI, pembubaran kabinet

aktivisme mahasiswa di kampus umum dimana sejak akhir tahun 1960 sudah berada dalam keadaan kekosongan kader. Praktis hanya kader dari kampus IAIN mengisi dalam kepengurusan PMII cabang Surabaya yang memang berbasis mahasiswa berlatar belakang NU. Hilangnya kegiatan aktivisme di kampus-kampus umum membuat HMI mengambil alih proses prekrutan kader baru yang berlatar belakang NU. Sekalipun beberapa dari mereka yang tidak cocok berproses di HMI, akan lari bergabung dengan PMII yang ada di IAIN.

Pada tahun 1989 PC PMII Surabaya dipimpin oleh seorang wanita yaitu Khofifah. Wanita pertama yang memimpin organisasi mahasiswa ini membuat gairah mahasiswa Surabaya yang berlatar belakang NU kembali lagi untuk kembali mengikuti PMII dikarenakan beliau dari kampus UNAIR yang merupakan kampus umum. Kenyataan bahwa kampus umum yang termajinakan secara kuantitas membuat kepengurusan beliau berkembang di atas desain yang berorientasi pada “Penguatan PMII di luar IAIN”. Saat itu beliau hanya mewarisi 3 komisariat dengan kantor yang berada satu kompleks dengan yayasan Khadijah. Beliau melakukan tiga macam untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling melengkapi sekaligus menghapus dikotomi kampus umum dan IAIN.

Pada acara yang dilaksanakan di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya yang bertempat di Wisma bahagia, Purnomo Kasidi yang menjabat sebagai Walikota Surabaya menyempatkan hadir pada acara

mempunyai kesempatan untuk menyebarkan gagasan modernisasi, dan mendukung terus pembangunan sebagai salah satu syarat untuk mengeluarkan Indonesia dari keterbelakangan dan keterpencilan

Aksi-aksi tersebut adalah alat untuk meyakinkan opini masyarakat Indonesia, kritik-kritik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terhadap mereka yang berada dalam pemerintahan rezim ini namun tidak pernah sesuai dengan pandangan yang baru, serta hubungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang khas dengan kalangan kampus dan unsur-unsur masyarakat lainnya, semuanya itu merupakan sifat-sifat dari mahasiswa yang perlu diperhatikan. Secara utuh, partisipasi besar dan kompleks dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini pada periode penegakan Orde Baru dibawah kekuasaan presiden Soeharto tidak boleh dianggap mudah, terlebih lagi jika hanya dianggap seakan-akan tidak ada. Tiga peranan PMII dalam kehidupan Orde Baru yaitu Ideologi, politik, dan kritik .

PMII pada periode 1966 ini adalah sebuah pelaku politik. Kader-kader PMII yang lahir beberapa tahun sebelum munculnya angkatan 66 dipentas perpolitikan, merupakan cerminan dari mahasiswa Nahdliyin pada tahun tersebut.

Berkat pengalaman dan reputasinya dalam berjuang dalam menahkukan rezim Orde Lama, maka PMII menjadi konseptor dan lobby pemuda serta mahasiswa di Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menkoordinir perjuangan melawan kekuatan-kekuatan rezim

Jendral Soeharto bertemu dengan presiden Soekarno untuk membahas surat penugasan khusus pada tanggal 10 Februari 1966. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan yang baik untuk menyelesaikan konflik ini. Keesokan harinya Jendral Soeharto mengajukan suatu konsep yang mungkin bisa mempermudah penyelesaian konflik politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Konsep yang diajukan oleh jendral Soeharto itu berisikan tentang: berdasarkan ketetapan MPRS No. XV/ MPRS/1966 yang berisikan presiden untuk berhalangan atau presiden harus menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Sesuai dengan janji presiden Soekarno pada tanggal 12 Februari 1967.

Pada tanggal 13 Februari 1967, panglima berkumpul kembali untuk mendiskusikan konsep yang akan diajukan kepada presiden sebelum diberikan kepada presiden Soekarno. Pada pukul 11.00 para panglima mengutus jendral Polisi Soetjipto Joedodihardjo dan jendral Panggabean untuk menghadap presiden. Dalam pertemuan antar panglima ini mereka belum menemukan kesamaan dalam berpendapat dikarenakan masih banyak hal yang tidak bisa dipenuhi itu harus dirubah menurut Presiden Soekarno.

Pada tanggal 19 Febuari diadakan pertemuan di istana Bogor. Isi dalam pertemuan tersebut menjelaskan presiden Soekarno tetap menolak mentandatangani konsep yang sudah diajukan oleh Soeharto. Sore harinya panglima angkatan laut Laksaman Mulyadi dipanggil

Dalam mekanisme politik Demokrasi Pancasila, musyawarah antara wakil-wakil rakyat harus selalu diadakan setiap membuat keputusan-keputusan, yang hasil akhirnya adalah kemufakatan. Demikian juga tidak diperkenankan *voting* sebagai tanda untuk memenangkan suara mayoritas. Pada tahun 1973 pemerintah mengambil kebijakan penyederhanaan partai politik. Demi memilih kepentingan mereka partai politik melakukan oposisi di pemerintahan dan mereka kurang memperhatikan program-program pembangunan negeri. Karenanya, sudah sangat efektif sekali kebijakan penyederhanaan partai untuk partai memusatkan dan mengontrol kekuasaan ditangan penguasa.

Penyederhanaan partai merupakan suatu bentuk tindakan politis dari kegagalan pengalaman traumatis partai-partai politik di era Demokrasi. Semakin banyaknya partai dan ideologi dianggap sama dengan banyaknya jumlah onfili yang dibuatnya. Maka dari itu pemerintah melakukan penyederhanaan untuk partai politik di Indonesia.

Hasil dari penerapan kebijakan itu menghasilkan pembentukan Golkar, PDI dan PPP. Pada tanggal 5 Januari 1973 PPP secara formal terbentuk, merupakan fusi dari empat partai Islam yakni PSII, NU, Parmusi dan Perti. Sedangkan penggabungan dari PNI, Parkindo, IPKI, Partai Khatolik dan Partai Murba jadi PDI yang formalnya berdiri pada 10 Januari 1973.

ekspor diatas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ekspor pupuk urea dilakukan terutama di Negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga sudah mampu mengekspor semen ke berbagai Negara di Eropa dan ASEAN.

Dalam bidang perhubungan telah tercatat rehabilitasi jembatan sepanjang 21.000 meter dan jalan sepanjang 8.000 km. Selain itu, telah baru dibangun juga jalan sepanjang 850 km dan penambahan jembatan baru sekitar 6.500 buah.

Dalam bidang pembangunan ekonomi Indonesia terdapat tiga sektor yang harus dikembangkan, yakni sektor Negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Selama Repelita II berhasil dibangun rumah inti dan rumah sederhana sebanyak 70.000 buah yang ditugaskan kepada perusahaan umum PERUMNAS (Perumahan Nasional), selain itu, telah ditingkatkannya pula rumah-rumah di desa-desa terpencil.

Dalam bidang pendidikan, program ini telah berhasil melampaui target yang sudah ditentukan, baik dalam hal rehabilitasi, pembangunan gedung-gedung sekolah baru, penyediaan buku-buku pelajaran, pengakatan guru, maupun dalam hal peningkatan mutu pendidikan lainnya.

Peningkatan dalam bidang komunikasi terlihat juga pada kemajuan-kemajuan yang dicapai pada sektor telepon. Satelit domestic palapa telah mempermudah hubungan antara semua provinsi dan kota-kota di Indonesia. Siaran RRI telah

dan bantuan keahlian. Selain itu, akan diberikan bantuan pemasaran, antara lain dengan jalan memberikan jalan prioritas untuk memperoleh tempat penjualan di pusat pertokoan dan pasar-pasar tradisional.

Segi lain yang juga mendapat perhatian ialah penerbangan baru. Pada akhir Repelita 2 jumlah penerbangan baru semakin diperluas dari 75 lokasi udara menjadi 105 lokasi. Selain penambahan jumlah bandara udara pemerintah juga menambah jumlah pesawat dan frekuensi penerbangan juga ikut ditingkatkan. Hal ini juga mengalami peningkatan dibidang perhubungan lautan perhubungan darat dan hubungan antara daerah dengan daerah lain semakin lancar, dan dengan demikian dapat dicapai pemerataan penyebaran pembangunan.

Segi lain yang juga mendapat perhatian ialah penerbangan pemerataan, tetapi hal itu tidak melupakan pembangunan dibidang yang lain. Di bidang ekonomi akan diusahakan pertumbuhan sebesar 6,5% setahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%, pendapatan riil per kapita diharapkan naik sebesar 24% dalam waktu lima tahun. Gambaran singkat perkiraan pertumbuhan ekonomi menurut sektor adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian : 3,5%
- b. Industri : 11%
- c. Pertambangan : 4%
- d. Bangunan : 9%
- e. Pengangkutan : 10%

Apabila kita menelusuri awal tahun lahirnya Orde Baru, yang merupakan semangat baru untuk semua masyarakat Indonesia untuk menjalankan kembali kehidupan berlandaskan Pancasila dan UUD 45, maka kita akan terus teringat kembali pada tahun 1966 seorang kepala negara yang selalu teratur dan terus-menerus mengajak kita semua untuk memahami dan melaksanakan apa yang telah ditunjukkan oleh pandangan hidup dan dasar negara kita.

Mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan merupakan tujuan utama kita dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama melalui pembangunan di segala bidang. Dengan mengamalkan Pancasila itu, serta memahami secara mendalam dan benar, kita akan bisa berjalan dengan aman menuju tujuan yang sudah bangsa ini inginkan yaitu menjadi bangsa yang merdeka.

Gagasan-gagasan mengenai pedoman dan menghayati pancasila telah ditemuakn presiden pada tanggal 12 April 1967 dan menjelaskan pancasila yang beliau beri nama (Ekaprasetia Pancakarsa). Bahan-bahan yang sedang diajukan oleh presiden Soeharto kepada MPR untuk dipertimbangkan antara lain pertama adalah mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan yang kedua adalah mengenai P-4. Kedua bahan pertimbangan tersebut merupakan hasil kerja tim sebelas yang lebih dikenal sebagai tim “sebelas” (tim penghimpun bahan-bahan sidang MPR), karena terdiri dari sebelas orang juga .

Sebagaimana yang telah diketahui, untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya MPR memiliki alat-alat kelengkapan, mereka adalah Badan Pekerja (BP) dan MPR dan komisi MPR. Membuat susunan acara sekaligus merumuskan rancangan putusan-putusan dalam sidang istimewa majelis adalah salah satu tugas dari BP dan MPR. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya. BP MPR telah membuat tiga panitia Ad. Hoc. Satu diantaranya ialah panitia Ad Hoc II, bertugas untuk menyusun rancangan ketetapan MPR tentang P-4. Bahan perbincangan Ad hoc II adalah rumusan naskah P-4 yang diajukan ke presiden sebagai pertimbangan terhadap majelis, yang merupakan lampiran dari isi pidato Presiden Soeharto yang telah disampaikan pada upacara pengambilan sumpah/janji para anggota MPR pada tanggal 1 oktober 1977.

Selama tiga bulan mereka mengadakan rapat, panitia Ad Hoc.II MPR menentukan kesepakatan-kesepakatan berikut. Pertama, bahwa P-4 merupakan penutupan dan pegangan hidup bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga Negara Indonesia, setiap penyelenggaraan Negara serta setiap lembaga kenegaraan/lembaga kemasyarakatan, baik daerah maupun pusat dan dilaksanakan secara utuh. Kedua, kesus mengenai pedoman tentang penghayatan dan pengalaman pancasila dan pengalaman sila ketuhanan Yang Maha Esa dipandang perlu ada penjelasan, penjelasan ini dianggap perlu oleh panitia Ad Hoc. II karena masalah-masalah yang menyangkut agama dan kepercayaan

juni 1979. Adapun isinya adalah pembangunan gedung sekolah dasar diantaranya adalah penambahan kelas baru, perlengkapan sekolah, fasilitas penyediaan air bersih dan rumah dinas penjaga sekolah, dilengkapi dengan penyediaan guru. Pada kebijakan kali ini pemerintah juga menyediakan pembangunan rumah dinas bagi kepala sekolah yang berada di daerah terpelosok. Tahun pertama Repelita III (1979/1980) jumlah murid pendidikan dasar telah mencapai 24.124 Juta.

Masa orde baru disebut juga era pembangunan, karena pada masa ini pembangunan diberbagai bidang berkembang cepat, namun pembangunan tersebut hanya mengedepankan pembangunan fisik, tak terkecuali dalam bidang pendidikan yang hanya terpusat pada pembangunan gedung-gedung sekolah, namun tenaga pendidikan tidak terlalu diperhatikan.

Meningkatkan pembangunan fasilitas penunjang pendidikan seperti berdirinya jumlah kelas yang dari tahun ke tahun selalu bertambah, maka jumlah murid yang ada juga semakin bertambah banyak, beberapa provinsi pun mengalami bertambahnya jumlah murid di tahun 1981-1983. Semakin banyaknya jumlah murid yang ada, harapanya angka putus sekolah semakin menurun, tentunya dengan di imbangi dengan kualitas dan kuantitas guru yang ada. Menurut data yang ada menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar secara

Pada saat ini sudah dikatakan memasuki fase pembagian tugas. Habibie melakukan pendekatan ditingkat supra struktur politik termasuk kepada Presiden Soeharto. Sedangkan, para mahasiswa dan pendukungnya melakukan pendekatan pada cendekiawan dalam bentuk susunan draft dan dukungan tertulis. Ringkasnya dapat disimpulkan bahwa kelahiran ICMI terjadi melalui tiga tahap yang berkaitan yaitu, prakarsa mahasiswa dan dukungan sejumlah cendekiawan dan pendekatan.

Pada tanggal 27 September 1990 mereka mengadakan pertemuan di kediaman Presiden Soeharto mengusulkan wadah tersebut diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.

Tanggal 25-26 November 1990. 22 orang cendekiawan yang dalam rangka proses penggodokan pembentukan ICMI bertemu di Tawanmangu Solo untuk merumuskan beberapa usulan GBHN 1993. Sedangkan itu, pada akhir September 1990 tim anggaran dasar telah berhasil menyusun konsepnya bersama dengan tim lainnya. Hasil rumusan mereka didialogkan dengan Habibie di rumah Menristek selama lebih dari 7 jam.

Tanggal 6 Desember 1990 oleh Presiden Soeharto dengan tema “Membangun Masyarakat Indonesia Abad ke 21”. Dihadiri oleh tujuh orang menteri, jenderal Try Sutrisno, dan 512 cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu dan profesi dari seluruh Indonesia. Penutupannya dilakukan dua hari kemudian oleh Wapres Sudharmono. Sejarah

2. Krisis Politik

Pada tanggal 29 Mei 1997 pemilihan umum ke 6 diselenggarakan memberikan kemenangan pada Golkar dengan perolehan suara 74,5 %, PPP 22,4 %, dan PDI 3 %. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, pada bulan Maret perhatian politik mengarahkan ke persidangan umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam sidang tersebut, Golkar mengusung kembali Jendral Soeharto untuk naik dalam pemilu ini.

Pada tanggal 20 Januari 1998 Golkar secara resmi menerima pencalonan jabatan kepresidenan. Pada tanggal 11 Maret 1998 dalam sidang umum MPR Soeharto terpilih menjadi presiden RI dan didampingi oleh B.J Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Presiden Soeharto membentuk kabinet barunya dengan menyertakan Siti Hardiyanti Rukmana, salah satu putrinya, sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial, dan orang dekatnya yaitu Bob Hasan, sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Setelah beberapa minggu Presiden Soeharto terpilih, sudah sejak lama para oposisi presiden Soeharto yang dibatasi mulai bermunculan lagi. Banyaknya aksi protes terhadap pemerintahan khususnya Soeharto yang ditandai oleh banyak munculnya gerakan mahasiswa sejak awal tahun 1998. Gerakan aksi protes mahasiswa yang mulai mengkristal dikampus-kampus. Adapun garis besarnya adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, KKN, serta sukesi kepemimpinan nasional.

Kesempatan massa untuk melakukan demonstrasi terjadi pada penutupan sidang umum MPR. Ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 11 Maret 1998. Aksi keluar kampus pun terjadi yang mana, para mahasiswa tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah. Menjelang bulan april 1998.

Kerusuhanpun sering terjadi antara aparat keamanan dengan mahasiswa. Tawaran untuk berdialog dengan aksi masa dilakukan jendral Wiranto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhakan. Menurut Wiranto, dialog sangat dibutuhkan saat kondisi kacau seperti ini. Sedangkan mahasiswa, menganggap tindakan yang dilakukan oleh Wiranto hanyalah tindakan sia-sia atau tidak efektif karena pada dasarnya tuntutan massa aksi mahasiswa ialah pengunduran diri Presiden Soeharto, reformasi politik dan ekonomi.

Pada tanggal 4 mei 1998 pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik yang dimana langkah yang diambil pemerintah saat itu bertentangan dengan tuntutan mahasiswa yang berkembang pada saat itu. Dalam kondisi krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan pada pemerintah ini terjadi dalam maraknya aksi-aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya.

Pada tanggal 9 mei 1998 Soeharto menghadiri konferensi G-15 di Kairo. Didalam pesawat menjelang keberangkatanya, Soeharto memintamasyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM.

kekuasaan Orde Baru pengkrucut ke dalam personalisasi kekuasaan Soeharto.

Pembungkaman sistematis Orde Baru dilakukan melalui instrumen-instrumen negara (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif) sebagai alat pengawasan. Sistem legitimasi pengawasan negara terhadap warganya. Oleh sebab itu hukum tidak bisa berdiri secara independen karena dibangun atas kepentingan kekuasaan. Misalnya paket UU politik yang diciptakan oleh kekuatan politik untuk melakukan pengawasan secara normatif kepada partai politik, lembaga swadaya masyarakat, ormas dan serikat-serikat yang berkembang di dalam masyarakat.

Sentralisasi pengawasan yang dilegalisasi oleh perundang-undangan dengan standarisasi kepentingan yang diinginkan dan dibangun oleh kekuasaan penguasa menampakkan bagaimana proses rejimentasi personal Soeharto berjalan dengan mulus. Pada perangkat normative terbangun, secara massif rejimentasi itu berjalan di tingkat kesadaran rakyat dan birokrasi.

Dengan instrument legalitas formal perundangan sebagai kerangka normatif pengawasan negara atas rakyat dilakukan oleh gugus institusi militer berperan sebagai penjamin berlangsungnya proses hegemoni dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Tindakan represif dengan mengedepankan kekerasan dalam bentuk terror, pembantaian, perlakuan tidak manusiawi dan pengasingan aktivis pro demokrasi menjadi bagian integral dari mekanisme kontrol kekuasaan

bergabung di gedung tersebut. Aparat keamananpun tidak dapat menghentikan para mahasiswa dalam saat kondisi seperti ini. Reformasi atau mati adalah slogan-slogan yang mereka gaungkan beserta menyanyikan lagu-lagu patriotik.

Pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR yang mendiskusikan untuk menentukan jadwal sidang umum Istimewa ditanggal 18 Mei 1998. Tanggal 19 Mei 1998 presiden bertemu dengan pimpinan senior muslim yang pada malam kemaren presiden Soeharto bertemu juga dengan Nurcholis Majid dan mengumumkan rencana untuk membentuk komisi pembaharuan dan kabinet baru.

Pada akhir pemerintahannya, para pembantu-pembantunya meninggalkan presiden Soeharto. Para menteri mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita untuk rapat serta menyusun pernyataan bahwa mereka menolak untuk bergabung dalam kabinet baru serta para menteri memutuskan untuk medesak presiden Soeharto untuk segera melepas jabatannya dari kursi kepresidenan. Sekitar pukul 20.00 pernyataan tersebut disampaikan ke Candana, dan pernyataan ini mengguncang presiden Soehart. Pada pertrmuan di malam yang sama, jendral Wiranto mendapatkan nasehat dari kelompok ahli hukum dan politik untuk menyarankan presiden segera memindahkan jabatannya ke B.J Habibie menjadi presiden merupakan solusi terbaik dari masalah yang sedang terjadi di Indonesia.

2. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa orde baru. Dinamika politik pada saat itu sangat terasa dari pelengseran Soeharto terhadap Presiden Soekarna melalui SUPER SEMAR. Sedangkan pada saat Soeharto menjabat sebagai Presiden, Soeharto melakukan banyak perubahan dalam memerintah dari menyederhanakan partai-partai politik yang dikarenakan pengalaman traumatis atas kegagalan partai politik era Demokrasi Parlementer. Penyerdehanaan partai menjadi 3 partai yaitu PPP sebagai perwakilan partai Islam, PDI sebagai perwakilan partai Nasionalis, GOLKAR sebagai perwakilan partai umum. Selain itu Presiden Soeharto juga melakukan penerepan asas tunggal sebagai bentuk berhasilnya merealisasikan P4. Ada dua alasan yang mendorong pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila yang pertama yaitu, pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya dimana terjadi pertarungan fisik (yang sering berakibat fatal). Kedua, secara ideologis Pancasila akan menepati posisi yang lebih kuat dalam kehidupannya sosial dan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan dalam bidang ekonomi Presiden Soeharto banyak melakukan pembangunan besar-besaran dari Repelita 1-5. Banyak perkembangan yang terjadi di Indonesia dari sektor pertanian, industri, pertambangan, dan infrastruktur yang lainnya.
3. Dalam masa akhir rezim Orde Baru banyak peristiwa yang menyebabkan itu terjadi yaitu krisis moneter dan krisis politik yang terjadi di Indonesia. Sedangkan di dalam kepengurusan PMII Cabang Surabaya

13. Hidayat Rahman, *MASYARAKAT INDONESIA abad XX*. Jakarta, PB PMII 1996.
14. Hidayat, Panji *Jurnal PERKEMBANGAN SD INPRES PADA MASA ORDE BARU TH 1973-1983*.
15. Hartono Mardjono, *Politik Indonesia (1996-2003)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
16. Hugiono P.K. Purwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.
17. Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
18. Lilik Zulaikha, *Metodologi Sejarah 1*. Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
19. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20 II*. Yogyakarta; KANISIUS 1974.
20. Muhammad Irfan, “*IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM INDONESIA: Dinamika Politik Santri Akhir Abad XX*”, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora 1996)
21. Muhammad fajrul, *CITRA DIRI PMII*. Yogyakarta: yayasan putra nusantara, 1988.
22. Mohtar Mas’oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.
23. M.C. Ricklefs ,*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
24. Nugroho Noto Susanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.

25. Otong Abdurrahman, *PMII 1960-1985 Untukmu satu tanah airku untukmu satu keyakinanaku*. Jakarta: PB PMII, 2005.
26. PB PMII, *Dokumen historis keputusan-keputusan KONGRES PMII KE 3*. Jakarta: PB PMII 1967.
27. *PRODUK HUKUM PMII (PERGERKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA)*. Jakarta: PB PMII, 2017.
28. Rasto, *Manajerial Jurnal manajemen dan system informasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
29. Rachman Zaini, *Post-Tradisionalisme Islam*. Jakarta ISISINDO MEDIATAMA 2000.
30. Syaiful Bahri Anshori, *POLITIK BUNYI-BUNYIAN Menabur Moral Menerjang Kemapanan*. Jakarta: PB PMII, 2000.
31. Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
32. Sudaryono, *Leadership Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.
33. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1979.
34. Suradi H, Dll, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan kebudayaan*. Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan.
35. Tempo, *Edisi Khusus Soeharto*, TEMPO (4-10 Februari 2008)
36. Tim Dokumentasi presiden RI, Soeharto 1921 ; Jejak langkah Soeharto. Jakarta: PT Citra Charisma Bunda 2003.

